

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Evaluasi Program

1. Hakikat Evaluasi Program

Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penilaian hasil.¹ Secara harfiah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian. Sedangkan menurut istilah evaluasi adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.² Lebih lanjut Arikunto menjelaskan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.³

Sementara itu, menurut Arifin evaluasi memiliki persamaan dan perbedaan dengan penilaian. Persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya juga sama, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya.⁴

Khusus bidang pendidikan, Bloom dalam A Muri menyatakan pendapatnya tentang evaluasi yaitu “*evaluation is the systematic collection of evidence to determine whether in fact certain changes are taking place in the learner as well as the determine the amount or degree of change in individual students.*”⁵ Dengan kata lain, penekanan evaluasi bidang pendidikan adalah pada proses pengumpulan dan analisis data secara

¹ Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal : 310

² Sudijono, Anas. 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hal: 1

³ Arikunto, Suharsimi & Jabar. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal: 2

⁴ Arifin, Zaenal. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. hal: 7

⁵ A Muri Yusuf, 2015. *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group hal : 19

sistematis untuk mengetahui bukti penguasaan peserta didik, ketercapaian tujuan, dan keefektifan program pendidikan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan penilaian melalui proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mengetahui ketercapaian tujuan dan keefektifan suatu program.

Adapun pengertian program adalah kegiatan atau aktifitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan dalam waktu tertentu.⁶ Sementara itu, menurut Arikunto program itu ada dua istilah yaitu pengertian secara khusus dan pengertian secara umum. Secara Umum program diartikan sebagai rencana, dan secara khusus program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam program yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.⁷

Pengertian program menurut Ahuja dalam A Muri, yang menyatakan :
“.. *a programme is an organized set of activities designed to produce result or set of result that will have an impact on a specific problem or need*”.⁸ Dengan kata lain program dapat diartikan sebagai sejumlah aktivitas yang dirancang secara terorganisir untuk membuat seperangkat hasil yang akan membawa dampak pada terpecahnya masalah khusus atau terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu kebijakan yang dirancang secara terorganisir dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk memecahkan masalah khusus agar terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan.

Salah satu bidang evaluasi program adalah evaluasi program bidang pendidikan. Pengertian evaluasi bidang program pendidikan dijelaskan

⁶ Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta : Rajawali Press. Hal : 17

⁷ Arikunto. *Opcit*. Hal 3-4

⁸ A Muri Yusuf, *Opcit*. hal : 144

Undang-undang nomor 20 tahun 2003, Evaluasi pendidikan adalah “kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.”⁹

Menurut para ahli antara lain bahwa evaluasi program adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan.¹⁰

Dengan demikian, evaluasi program pendidikan merupakan studi yang sistematis dan didesain, dilaksanakan, serta dilaporkan untuk membantu memutuskan, meningkatkan keberhargaan dan manfaat program-program pendidikan termasuk program pemberdayaan pemberdayaan pendidikan agama Islam.

2. Tujuan Evaluasi Program

Konsep evaluasi program terdapat tiga kata kunci yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu (1) pertimbangan (*judgement*), (2) Nilai (*value*) dan (3) arti (*worth*), sehingga tersedia alternatif keputusan yang berguna valid dan reliabel.¹¹

Langkah pertama yang harus diperhatikan ketika akan melakukan kegiatan evaluasi adalah tujuan evaluasi itu sendiri karena tanpa tujuan maka evaluasi tersebut tidak berpengaruh terhadap apa yang dievaluasi, di sisi lain evaluasi sangat berkaitan dengan finansial, oleh karena itu tujuan evaluasi harus dipertajam sehingga sasaran yang ingin dicapai berjalan sesuai apa yang menjadi harapan pembuat kebijakan.

⁹ Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 21

¹⁰ Arikunto. *Opcit.* Hal : 8

¹¹ A Muri Yusuf, *Opcit.* hal : 145

Menurut Sudjana bahwa tujuan khusus evaluasi program pendidikan nonformal terdiri dari 6 (enam) hal, yaitu :

- 1) Memberikan masukan bagi perencanaan program
- 2) Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program.
- 3) Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program.
- 4) Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program.
- 5) Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervise dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program.
- 6) Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.¹²

Menurut A Muri evaluasi program dalam berbagai bentuk proyek secara umum bertujuan untuk :

- 1) Memantau pelaksanaan program
- 2) Memperbaiki rencana program
- 3) Menyempurnakan system penyampaian
- 4) Meningkatkan program
- 5) Membantu pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan tentang program.¹³

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi program adalah memberikan pertimbangan, penilaian dan arti sebagai masukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil program sehingga dapat memperbaiki, menyempurnakan, meningkatkan program dalam membantu pemangku kebijakan mengambil keputusan.

3. Model-model Evaluasi Program

Terdapat banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Meskipun antara satu dengan yang lainnya berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau

¹² Sudjana, D. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal : 48.

¹³ A Muri. *Opcit*. Hal : 146.

informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program. Model-model evaluasi ada yang dikategorikan berdasarkan ahli yang menemukan dan yang mengembangkannya, serta ada juga yang diberi sebutan sesuai dengan sifat kerjanya.¹⁴

Arikunto mengemukakan bahwa ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program yaitu Stufflebeam, Michael Scriven, Stake, Glaser, Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi delapan,¹⁵ yaitu sebagai berikut :

- 1) *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler yang penekanan evaluasinya pada tujuan program sebagai alternative dalam mengambil keputusan.
- 2) *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven yang penekanan evaluasinya pada efek nyata dari suatu kegiatan program.
- 3) *Formative-Summative Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven.
- 4) *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake yang penekanan evaluasinya pada hasil manfaat program.
- 5) *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake yang penekanan evaluasinya pada manfaat atau hasil program pada tingkah laku peserta program.
- 6) *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
- 7) *CIPP Evaluation Model*, yang dikembangkan oleh Stufflebeam yang penekanan evaluasinya pada context, input, process, product secara keseluruhan.
- 8) *Discrepancy Model*, yang dikembangkan oleh Provus penekanan pada evaluasi program untuk memperbaiki, memelihara atau menghentikan program.

¹⁴ Arikunto. *Opcit.* Hal : 40

¹⁵ Arikunto. *Ibid.* hal 40-41

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model evaluasi program yang paling sesuai untuk program pemberdayaan pendidikan agama Islam adalah *responsive evaluation* yang dikembangkan oleh Stake atau sering dikenal dengan evaluasi program *stake's model*. Karena model evaluasi responsif penekanan evaluasi programnya pada hasil program ditinjau dari manfaat bagi penerima program atau peserta didik (masyarakat).

4. Evaluasi Program Responsif

Model evaluasi responsif oleh Robert Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu (1) deskripsi (*description*) dan (2) pertimbangan (*judgment*); serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) *antecedent/context*, (2) *transaction/process*, dan (3) *outcomes/output*.¹⁶

Adapun teori *responsive evaluation* menurut Abma bahwa “*The theory of responsive evaluation Robert Stake (1975) coined the term responsive evaluation. The historical development of evaluation: measurement, description, judgement and negotiation.*”¹⁷ dengan kata lain teori evaluasi responsif adalah model evaluasi dalam pemberian makna, mendeskripsikan, memberikan pertimbangan dan negosiasi suatu program.

Evaluasi model responsif menekankan pada pendekatan *kualitatif naturalistik*, model evaluasi ini tidak dikenal sebagai pengukuran melainkan sebagai pemberian makna atau menggambarkan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat atau berkepentingan dengan program tersebut. Hal terpenting dari evaluasi responsif adalah pengumpulan data dan sistesis data. Berdasarkan data tersebut seorang evaluator mencoba responsif terhadap orang-orang yang berkepentingan pada hasil evaluasi. Kelebihan model evaluasi ini adalah peka terhadap

¹⁶ Arikunto. *Ibid.* Hal : 43

¹⁷ Abma, 2005. *Responsive evaluation: Its meaning and special contribution to health promotion*. The Netherland : Elsevier.

berbagai pandangan dan kemampuannya mengakomodir pendapat yang abiguitas, sedangkan kekurangannya adalah pengambil keputusan sulit menentukan prioritas, tidak mungkin menampung semua sudut pandang, dan membutuhkan waktu dan tenaga.¹⁸

Lebih lanjut A Muri menjelaskan bahwa model evaluasi responsif bermaksud memberikan wahana yang lebih luas dalam bidang evaluasi program pendidikan. Model evaluasi ini merupakan tipe evaluasi pendidikan yang menekankan pada kriteria ekstinsik yaitu hasil atau dampak suatu program terhadap perilaku peserta didik (masyarakat).¹⁹

Evaluasi responsif model stake menurut A Muri juga menekankan pada tiga fase yaitu yaitu *antecedent* (perencanaan), *transaction* (pelaksanaan), dan *outcomes* (hasil). Sebagai berikut :

- 1) *Antecedent* (perencanaan), adalah kondisi yang ada sebelum terjadinya proses program. Sehubungan dengan ini, evaluasi perencanaan hendaklah menggambarkan atau memberikan terlebih dahulu kondisi awal program dan rencana program untuk memudahkan *transaction* (pelaksanaan).
- 2) *Transaction* (pelaksanaan), adalah kegiatan pertemuan atau kontak pendidik (pendamping) dengan peserta didik (masyarakat) yang bertanggungjawab dalam proses program. Beberapa transaksi yang dapat dilaksanakan seperti kegiatan diskusi, belajar, pendidikan di ruangan dan di lapangan. Transaksi ini bersifat dinamis, pengumpulan data evaluasi dapat dipergunakan sebagai umpan balik untuk proses selanjutnya yaitu *outcomes* (hasil/manfaat).
- 3) *Outcomes* (hasil), adalah sesuatu yang dicapai oleh peserta didik (masyarakat) sesuai dengan tujuan program, seperti kemampuan-kemampuan (*abilities*), prestasi (*achievements*), sikap (*attitudes*), dan aspirasi peserta didik (masyarakat) sebagai pengalaman program

¹⁸ Zainal, 2010. *Model-model evaluasi Program*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia. Hal :13.

¹⁹ A Muri. *Opcit*. Hal : 127.

pendidikan. *Outcome* adalah dampak dari pendidik atau pendamping program.²⁰

Hubungan antara *antecedent* (perencanaan), *transaction* (pelaksanaan), dan *outcomes* (hasil) program evaluasi terlihat pada *description matrix* dan *judgment matrix*. *Description matrix* merupakan penggambaran *intens (goals, objective)* dan *observation* atau tujuan yang akan dicapai. Sedangkan *judgment matrix* merupakan penggambaran *standard* dan *judgment*.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang berjudul “evaluasi program pembinaan mental pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Bone”, penelitian ini menggunakan model evaluasi responsif, yang meneliti pada tiga aspek yaitu perencanaan program, pelaksanaan program dan hasil program.²¹

Penelitian lainnya yang menggunakan model evaluasi responsif adalah oleh Layane Thomas Mabasa yang berjudul “*responsive evaluation approach in evaluating the safe schools and the child-friendly schools programmes in the Limpopo province*”. penelitian ini juga menggunakan model evaluasi responsif, yang meneliti pada tiga aspek yaitu perencanaan program, pelaksanaan program dan hasil program.²²

Dengan demikian, model evaluasi responsif tepat digunakan untuk melakukan evaluasi program pemberdayaan pendidikan agama Islam dengan mendeskripsikan dan memberikan pertimbangan kepada pelaksana program. Evaluasi responsif terdiri atas tiga tahap dalam evaluasi program yaitu perencanaan, pelaksanaan dan hasil program.

²⁰ A Muri : *Ibid.* Hal : 128.

²¹ Ridwan. 2017. Tesis : *Evaluasi Program Pembinaan Mental Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone*. Makasar : Universitas Negeri Makasar.

²² Layane Thomas Mabasa. 2013. *A responsive evaluation approach in evaluating the safe schools and the child-friendly schools programmes in the Limpopo province*. Philosophy in social Science methods at Stellenbosch University.

B. Pemberdayaan berbasis Pendidikan Agama Islam

1. Makna Pemberdayaan

Pemberdayaan, Secara etimologis berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.²³ Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya dan proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya. Teori pemberdayaan merupakan satu kesatuan proses dan hasil, “*theories of empowerment include both processes and outcomes.*”²⁴

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.²⁵ Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan yang baik.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit.

Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

²⁴ Perkins. *Empowerment theory, research, and application*, American Journal of Community Psychology. diakses 1 Oktober 2018 . Hal : 569

²⁵ Wikipedia.org. *Pengertian Proses* .diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.

untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Hakikat Pendidikan Agama Islam

*“Empowerment is ‘enablement’ by changing the person, changing structures, replacing or recreating conventional institutions and rearranging the environment.”*²⁶ Pemberdayaan adalah 'pengaktifan' dengan mengubah orang, mengubah struktur, mengganti atau menciptakan kembali institusi konvensional dan menata ulang lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian Unesco, Pemberdayaan masyarakat melalui beberapa mekanisme (*mechanisms*), yaitu :

1. *Awareness Raising* (penyadaran),
2. *Education and Training* (pendidikan dan pelatihan),
3. *Organising and Networking* (pengorganisasian),
4. *Socio-economic Aid* (bantuan sosial ekonomi).²⁷

Sejalan dengan pandangan tersebut bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.²⁸

²⁶ Unesco. Institute for Education. 1995. *Women, Education and Empowerment: Germany* : Robert Seemann. hal : 53.

²⁷ Unesco. *Ibid*

²⁸ Ambar Teguh .Opcit., 2004. Hal : 83.

2. Pendidikan Agama Islam

a. Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran

Menurut pemahaman Muhaimin, pendidikan agama Islam adalah :

- 1) Pendidikan menurut Islam atau pendidikan yang berdasarkan Islam atau pendidikan yang Islami yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun berdasarkan ajaran Islam yang terkandung dalam sumbernya al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Upaya mendidikkan agama dan nilai-nilai ajaran Islam agar menjadi *way of life* (pandangan hidup) yang terwujud dalam tindakan berupa kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu orang lain dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam.
- 3) Pendidikan dalam Islam atau praktek atau proses pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam, baik Islam sebagai agama, ajaran, sistem budaya dan peradaban sejak jaman Nabi Muhammad sampai sekarang.²⁹

Menurut Hidayat pendidikan agama Islam diturunkan menjadi ajaran Islam :

Ajaran islam dapat dibagi menjadi dua yaitu bidang akidah dan amal. Bidang akidah yang bertujuan untuk mendorong dan membimbing manusia dalam mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan pandangan, pemahaman, keyakinan dan perbuatan. Bidang amal yang bertujuan untuk mendorong dan membimbing manusia dalam mengembangkan amal-amal saleh sehingga tercapai kesempurnaan amal ibadah.³⁰

Sementara itu, materi pendidikan agama Islam dalam kurikulum pendidikan terbagi atas empat bidang yaitu akidah akhlak, al-Qur'an hadits, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam.

Akidah adalah sesuatu yang pertama kali harus diimani dengan yakin oleh seorang mukmin dengan keyakinan yang pasti, ridho dan menerima

²⁹ Muhaimin. 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal :4-6

³⁰ Junaidi Hidayat, 2008. *Akidah Akhlak MTs kelas VII*. Jakarta : Erlangga.

sepenuh hati serta merasa tenang dengan keyakinannya tersebut. Secara sederhana aqidah islam adalah iman kepada Allah, malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, Rasul-rasul Allah, Hari akhir serta qada' dan qadar, yang kemudian dikenal dengan rukun Iman. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 177, artinya *"..Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi."*³¹ Adapun rukun yang ke enam yaitu iman kepada qadar didasarkan kepada hadis nabi, ketika beliau ditanya oleh Jibril tentang iman, maka Nabi menjawab *"Hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari kemudian dan hendaknya pula kamu beriman kepada qadar baik maupun buruk."*³²

Akidah dan akhlak adalah bagian penting dalam syariat islam, keduanya merupakan kesatuan dan memiliki hubungan timbal balik. Akidah melahirkan Akhlak, sebagaimana dijelaskan dalam kaitan Iman Islam dan Ihsan, akidah merupakan Usul (dasar) yang menjadi Pondasi Amaliyah Ibadah maupun akhlak, oleh kerennanya Akidah yang benar akan melahirkan akhlak yang baik.

Al-Qur'an adalah firman Allah Swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, diriwayatkan kepada ummat Islam secara mutawatir, membacanya sebagai ibadah, sebagai mukjizat, sebagai petunjuk dan sebagi sumber hukum Islam pertama yang mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan.³³ Sedangkan Al-Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad Saw baik perkataan, perbuatan maupun taqir. Hadits dijadikan sebagai sumber hukum kedua ummat Islam.³⁴

³¹ Al-Qur'an

³² Al-Hadits

³³ Muhaimin. Mujib, dkk. 2005. Kawasan dan Wawasan Studi Islam. Jakarta : Putra Grafika. Hal : 45

³⁴ Muhaimin. *ibid.* Hal : 89

Adapun ruang lingkup materi kajian fikih dalam pendidikan agama Islam baik di Madrasah maupun disekolah secara garis besar meliputi fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah terkait dengan materi thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan fikih muamalah terkait dengan materi mawaris, jual beli, pernikahan, hukum dan sebagainya.³⁵

Sementara itu materi sejarah kebudayaan Islam dalam pendidikan Agama Islam ruang lingkungnya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada kenyataan-kenyataan alam dan ummat Islam.³⁶

Apabila dilihat dari nilai-nilai pendidikan agama Islam terdiri atas tiga pilar utama, yaitu: nilai *I'tiqodiyah*, nilai *Khuluqiyah*, dan nilai *Amaliyah*.³⁷

1) Nilai *I'tiqodiyah*,

Nilai *I'tiqodiyah* ini biasa disebut dengan aqidah, nilai *I'tiqodiyah* yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan keimanan seperti percaya kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu. Islam berpangkal pada keyakinan tauhid, yaitu keyakinan tentang wujud Allah, tak ada yang menyamai-Nya, baik sifat maupun perbuatan.

2) Nilai *Khuluqiyah*,

Nilai *Khuluqiyah* yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Akhlak biasa disebut dengan moral. Akhlak ini menyangkut moral dan etika yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji. Nilai ini meliputi tolong

³⁵ Sukiman. 2018. *Modul PPG Fikih*. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam: Kementerian Agama RI.

³⁶ Muhaimin. *Opcit*. Hal : 119

³⁷ Nugroho, Bekti & Mustaidah. 2017. *Identifikasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Pnpm Mandiri*. Jurnal IAIN Salatiga Jateng. Hal : 75 - 77

menolong, kasih sayang, syukur, sopan santun, pemaaf, disiplin, menepati janji, jujur, tanggung jawab dan lain-lain.

3) Nilai Amaliyah

Nilai *Amaliyah* yaitu yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari baik yang berhubungan dengan pendidikan ibadah dan pendidikan muamalah. Pendidikan ibadah memuat hubungan antara manusia dengan Allah, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan nazar, yang bertujuan untuk aktualisasi nilai *'ubudiyah*. Nilai ibadah ini biasa kita kenal dengan rukun Islam, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan pendidikan muamalah memuat hubungan antar sesama manusia baik secara individu maupun kelompok.

Lebih lanjut Abudin Nata menjelaskan bahwa materi pendidikan agama Islam dengan sifatnya universal, mutlak, berisi ajaran tentang berbagai aspek kehidupan manusia dan memiliki posisi yang strategis serta menyediakan bahan-bahan dalam pengembangan pendidikan Islam yang komprehensif.³⁸

Berdasarkan uraian di atas mengenai materi pelajaran pendidikan agama Islam yang berhubungan dengan program pemberdayaan adalah materi akidah, materi akhlak dan materi amaliyah (fikih ibadah dan muamalah) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Materi akidah dan akhlak dalam pemberdayaan terkait dengan membangun kesadaran masyarakat, materi amaliyah (fikih ibadah dan muamalah) terkait dengan penguatan pedoman dalam menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pendidikan Islam sebagai Lembaga

Berbicara tentang lembaga pendidikan, maka akan menyangkut masalah siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di dalam lembaga itu. Secara garis besar, lembaga-lembaga

³⁸ Abudin Nata, hal 52..

pendidikan itu dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu, keluarga (informal), sekolah (formal) dan masyarakat (nonformal).

Ketiga komponen tersebut dalam satu sistem, yaitu sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 9, bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program.³⁹ Masyarakat adalah komponen pendidikan nasional yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. Adapun masalah mutu pendidikan, bukan hanya masyarakat yang bertanggungjawab, tetapi keluarga dan sekolah juga ikut bertanggung jawab.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 13, 14, 15 dan 16 tentang jalur jenjang dan jenis pendidikan terdiri atas pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah) dan nonformal (masyarakat).⁴⁰ yaitu :

1) Keluarga

Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat anak didik pertama-tama menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarga lainnya. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia yang masih muda, karena pada usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh pendidikan orang tuanya dan anggota lainnya. Dalam ajaran Islam telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya yang artinya, “Setiap anak dilahirkan ke dasar fitrah, maka sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi atau Nasrani.”⁴¹ Berdasarkan *hadith* tersebut, jelaslah bahwa orang tua memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian anak didik.

³⁹ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 9.

⁴⁰ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 13-16.

⁴¹ Al-Hadits

2) Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting sesudah keluarga, karena semakin besar kebutuhan anak, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian pada lembaga sekolah ini. Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam mendidik anak. Sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak mengenai apa yang tidak dapat atau tidak ada kesempatan orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarga. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal sebagai tempat belajar siswa. Sekolah mempunyai dua aspek penting, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Di satu pihak, pendidikan sekolah bertugas mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi anak secara optimal. Di pihak lain, pendidikan sekolah bertugas mendidik anak agar mengabdikan dirinya kepada masyarakat, sekolah juga dituntut untuk dapat merekam segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, sekolah memberi informasi dan penjelasan kepada peserta didik terhadap ontologis suatu peristiwa, maka peserta didik diharapkan dapat menentukan arah dan sikap yang tepat dalam menyikapi suatu peristiwa.

3) Masyarakat

Lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan ini telah dimulai sejak anak-anak untuk beberapa jam sehari lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Di dalam masyarakat terdapat beberapa lembaga atau perkumpulan atau organisasi

seperti, organisasi pemuda, organisasi kesenian, pramuka, olahraga, keagamaan, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut membantu pendidikan dalam usaha pembentukan sikap, kesusilaan dan menambah ilmu pengetahuan di luar sekolah dan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas tentang lembaga pendidikan islam dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam pada prinsipnya terbagi atas tiga bagian yaitu pendidikan keluarga (informal), pendidikan sekolah (formal) dan pendidikan masyarakat (nonformal). Adapun lembaga pendidikan Islam yang terkait dengan penelitian ini adalah lembaga pendidikan masyarakat (nonformal) yaitu Saung Ilmu di desa Pelakat kabupaten Muara Enim.

3. Program Pemberdayaan berbasis Pendidikan Agama Islam

Program pemberdayaan pendidikan agama Islam sesuai dengan al-Qur'an yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 11, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدٍّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.⁴²(Q.S Ar-Ra'd: 11).

Program pemberdayaan pendidikan agama Islam juga harus selaras dengan landasan pelaksanaan pendidikan dan berhubungan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam.

⁴² Q.S Ar-Ra'd: 11. Opcit.

a. Landasan Program Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam

Program pemberdayaan pendidikan agama Islam haruslah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 3 berbunyi “Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.” Lebih lanjut tentang pemberdayaan pendidikan dijelaskan dalam pasal 4 ayat 6 yang berbunyi “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.”⁴³

Pendidikan agama dan keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007, pada pasal 2 berbunyi :

- 1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.
- 2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.⁴⁴

Sementara itu menurut Haidar bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia baik ditinjau dari segi lembaga maupun mata pelajaran, perlu diberdayakan dengan cara mencari jalan keluar dari berbagai problema yang dihadapi. Pemberdayaan pendidikan agama Islam terkait dengan berbagai komponen yaitu kelembagaan, kurikulum,

⁴³ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan

manajemen, pendidik, peserta didik, alat sarana dan fasilitas serta kebijakan pemerintah.⁴⁵

Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan di atas serta menurut penelitian sebelumnya bahwa pendidikan agama Islam perlu untuk diberdayakan, pemberdayaan pendidikan agama Islam pada peserta didik berlangsung sepanjang hayat, pendidikan agama Islam diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pemberdayaan pendidikan agama Islam dapat diselenggarakan melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam yang terkait dengan kurikulum, pendidik dan peserta didik.

b. Hubungan antara Pembelajaran dan Program Pemberdayaan berbasis Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran berasal dari kata belajar, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. Hal pokok dari belajar adalah membawa perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan, perubahan itu pada pokoknya didapatkan kecakapan baru, perubahan itu terjadi karena usaha yang disengaja.⁴⁶

Sementara itu pemberdayaan adalah satu kesatuan proses dan hasil, *“theories of empowerment include booth processes and outcomes.”* Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge, attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan yang baik yaitu kemandirian.⁴⁷

⁴⁵ Haidah, hal 11-12

⁴⁶ Sagala, 2009. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung : Alfabeta. hal 37.

⁴⁷ Perkins. *Empowerment theory, research, and application*, American Journal of Community Psychology. diakses 1 Oktober 2018 . Hal : 569

Adapun teori pembelajaran yang berhubungan dengan teori pemberdayaan diantaranya adalah teori belajar *konstuktivisme* dan teori belajar sosial (*social learning theory*), dalam teori konstuktivisme mendorong peserta didik untuk kemandirian dan inisiatif dalam belajar. Sedangkan teori belajar sosial bahwa mengembangkan tingkah laku peserta didik dengan meniru tingkah laku yang diterima dari masyarakat.⁴⁸ Kedua teori belajar tersebut sejalan dengan teori pemberdayaan pada program pemberdayaan pendidikan agama Islam.

Program pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi.⁴⁹ Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pemberdayaan pendidikan agama Islam adalah bagian dari pembelajaran, karena pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, sementara pembelajaran merupakan konsep perubahan tingkah laku secara umum. Untuk mencapai tujuan program pemberdayaan pendidikan agama Islam dalam mewujudkan kemandirian masyarakat sesuai dengan pandangan pendidikan islam, maka diperlukan tiga komponen penting dalam program pemberdayaan pendidikan agama islam, yaitu materi (program pemberdayaan pendidikan agama Islam), pendidik (pendamping program), dan sarana prasarana pendukung program pemberdayaan pendidikan agama Islam.

⁴⁸ Asori, 2008. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung : CV. Wacana Prima. hal : 29-30

⁴⁹ Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media: hal:82.

C. Evaluasi Program Pemberdayaan berbasis Pendidikan Agama Islam

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.⁵⁰ Melakukan evaluasi program pendidikan merupakan hak masyarakat, “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.⁵¹ Program pemberdayaan pendidikan agama Islam merupakan salah satu dari program pendidikan yang perlu untuk dievaluasi.

Evaluasi program pemberdayaan pendidikan agama Islam dilakukan pada tiga komponen penting yaitu (1) materi (program pemberdayaan pendidikan agama Islam), (2) pendidik (pendamping program), dan (3) sarana prasarana pendukung program pemberdayaan pendidikan agama Islam.

1. Evaluasi terhadap Materi Program Pemberdayaan berbasis Pendidikan Agama Islam,

Materi program pemberdayaan pendidikan agama Islam tentunya terkait dengan materi pendidikan agama Islam itu sendiri, yaitu materi akidah, akhlak dan amaliyah (fikih ibadah dan muamalah) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Berdasarkan prinsip program pemberdayaan, maka materi pendidikan agama Islam tersebut haruslah dapat mengantarkan peserta didik (masyarakat) menjadi mandiri.

Maksudin mendefinisikan mandiri secara lebih luas, yaitu sikap hidup dan kepribadian merdeka yang dimiliki seseorang, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan nilai keislaman.⁵²

Untuk mewujudkan kemandirian Peserta didik (masyarakat) harus mempunyai otonomi dalam belajar, yaitu :

⁵⁰ Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 21

⁵¹ Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003, pasal 8

⁵² Maksudin, *Pendidikan Karakter Nondikotomik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- a) Peserta didik (masyarakat) mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajarnya.
- b) Peserta didik (masyarakat) boleh ikut menentukan bahan belajar yang ingin dipelajarinya dan cara mempelajarinya.
- c) Peserta didik (masyarakat) mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri.
- d) Peserta didik (masyarakat) dapat ikut menentukan cara evaluasi yang akan digunakan untuk menilai kemajuan belajarnya.⁵³

2. Evaluasi terhadap Pendidik (Pendamping) Program,

Pendidik atau pendamping program pemberdayaan pendidikan agama Islam idealnya mengacu kepada kompetensi pendidik (guru), yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Guru Pendidikan agama Islam harus dapat menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.⁵⁴ Penjelasan mengenai standar kompetensi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki Kompetensi Pedagogiek,

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan

⁵³ Kurniawan, Syamsul, *Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

⁵⁴ Permendiknas nomor 16 tahun 2017 tentang standar kompetensi guru.

pembeajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi.

b) Memiliki Kompetensi Profesional,

Kompetensi professional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran, dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum, serta menambah wawasan keilmuan.

c) Memiliki Kompetensi Sosial,

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari pembimbing serta teladan bagi para masyarakat untuk berkomunikasi dan siswa, di masyarakat guru merupakan figur teladan bagi masyarakat di bergaul secara efektif dengan peserta didik, sekitarnya yang memberikan kontribusi sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang positif dalam norma-norma sosial di masyarakat.

d) Memiliki Kompetensi Kepribadian,

Kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhak mulia.⁵⁵

3. Evaluasi terhadap Sarana Prasarana Program

Sarana prasarana sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan program pemberdayaan pendidikan agama Islam. Standar sarana prasana yang baik menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007 yaitu tersedianya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat olahraga.⁵⁶

⁵⁵ Modul Paedagogik oleh LPTK UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018. Hal 71-76

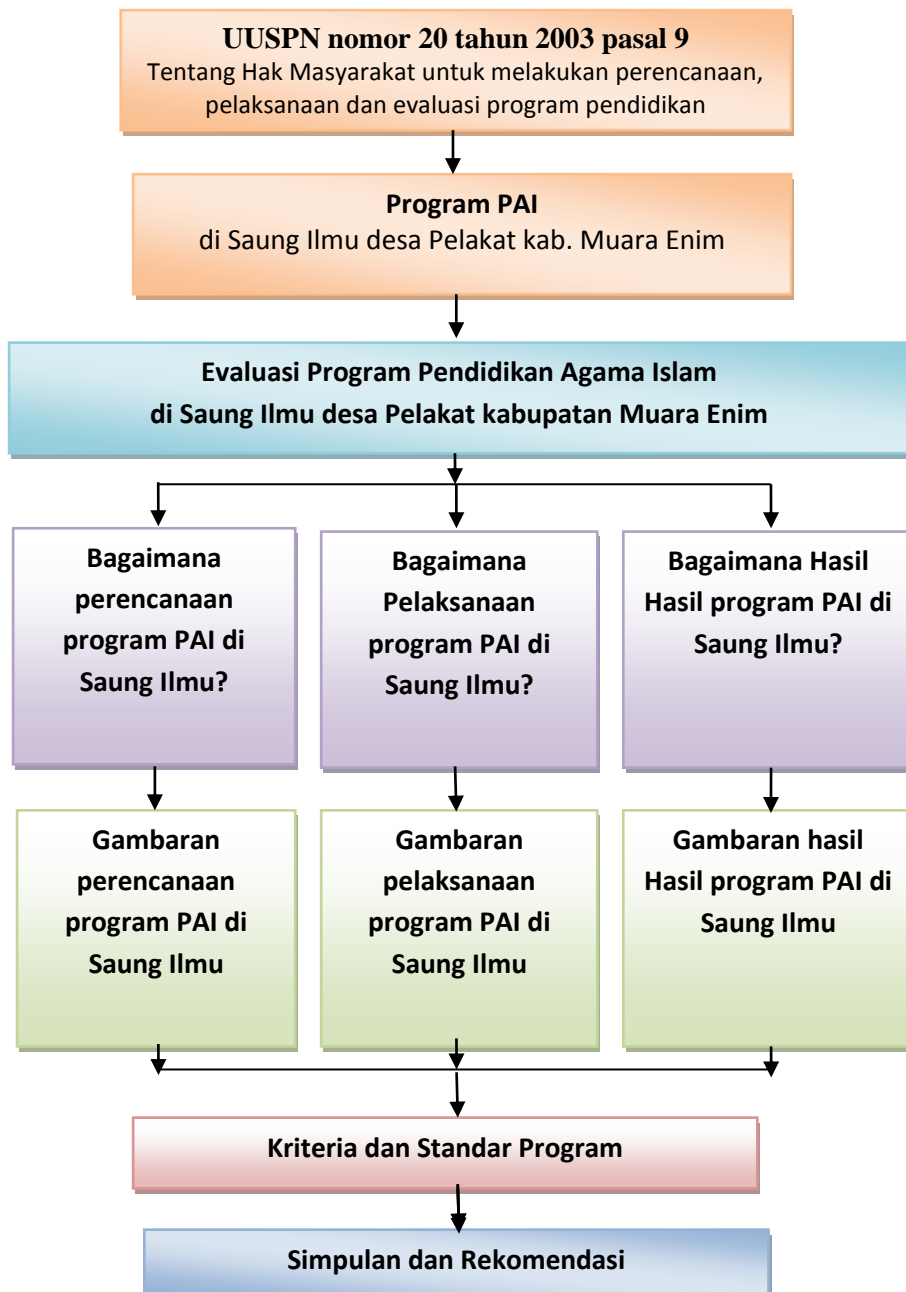
⁵⁶ Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang sarana prasarana.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan dalam susunan kriteria dan standar evaluasi program pemberdayaan pendidikan agama Islam pada tabel 2.1. kriteria dan standar evaluasi program sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Kriteria dan Standar Avaluasi Program Pendidikan Agama Islam

Kriteria Program	Standar Program
Materi program pemberdayaan pendidikan agama Islam yang bertujuan mewujudkan <i>kemandirian</i> masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan program yang ingin dicapai 2) Masyarakat boleh ikut menentukan bahan belajar yang ingin dipelajarinya dan cara mempelajarinya 3) Masyarakat mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatannya dan caranya sendiri. 4) Masyarakat dapat ikut menentukan cara evaluasi yang akan digunakan untuk menilai kemajuan programnya. 5) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mandiri, menjalankan ibadah secara mandiri dan bermuamalah secara mandiri.
Pendidik atau Pendamping program pemberdayaan pendidikan agama Islam, sesuai dengan standar kompetensi guru pendidikan agama Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi Kualifikasi Akademik 2) Memiliki Kompetensi Pedagogiek 3) Memiliki Kompetensi Profesional 4) Memiliki Kompetensi Sosial 5) Memiliki Kompetensi Kepribadian
Sarana prasarana pendukung program pemberdayaan pendidikan agama Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya ruang kelas 2) Tersedianya perpustakaan dan laboratorium 3) Tersedianya ruang pengelola 4) Tersedianya tempat ibadah 5) Tersedianya UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat olahraga.

Berdasarkan kriteria dan standar tersebut, maka dapat disusun kerangka evaluasi program pemberdayaan pendidikan agama Islam menggunakan model evaluasi responsif pada gambar 2.1. Skema Evaluasi Program sebagai berikut :



Gambar 2.1. Skema Evaluasi Program Pendidikan Agama Islam